

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Menurut (Sukirno, 2016:9) “pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”. Perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara berfungsi sebagai ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara, hal tersebut diakibatkan pada peningkatan kegiatan ekonomi. Ketika kegiatan ekonomi melebihi apa yang dicapai di masa lalu, ekonomi dianggap mengalami pertumbuhan yang cepat.

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara berkembang yang berusaha mencapai kemandirian ekonomi. Meskipun Indonesia menyadari hal ini, namun sulit untuk mencapai kemandirian ekonomi tanpa bantuan dari negara lain karena keterbatasan sumber daya salah satunya berupa modal. Dengan kondisi tersebut, Indonesia pada akhirnya menjalin kemitraan dengan negara lain untuk mencapai pertumbuhan nasional.

Bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, utang luar negeri merupakan faktor yang dapat mendorong perekonomian sekaligus menghambat perekonomian. Utang luar negeri dijadikan sebagai faktor yang mendorong perekonomian disebabkan utang luar negeri menjadi salah satu sumber dana yang

dapat digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut terjadi dikarenakan suatu negara sangat membutuhkan dana dari pihak luar berupa utang, namun dapat juga utang yang dilakukan sebagai dampak dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin dari beberapa negara tertentu. Sedangkan utang luar negeri sebagai faktor yang penghambat perekonomian disebabkan besarnya tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada pihak yang memberikan utang, jika aliran dana utang luar negeri tidak dipergunakan secara maksimal dan tepat.

Cahyaningrum, et al (2022: 39) mengatakan bahwa:

Dalam jangka pendek, utang luar negeri dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kehadiran utang luar negeri akan memperbaiki kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta membantu pemerintah mengisi defisit APBN. Namun, dalam jangka panjang negara akan menanggung pembayaran angsuran dan bunga utang luar negeri yang terus meningkat. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya diangsur setiap tahun melalui APBN. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil dari APBN yang digunakan untuk pembangunan.

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang menjadi salah satu cara kerja pemerintah untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah yang akan meningkatkan permintaan agregat (AD), sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Disisi lain peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan pembengkakan anggaran, sehingga terjadi defisit anggaran pada APBN.

Menurut Keynesian dalam Wahyudi (2020: 105) mengatakan bahwa:

Perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal asing. Penanaman modal asing dapat diartikan sebagai penempatan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atas modal yang telah ditanamkan. Peningkatan penanaman modal asing atau mendatangkan modal dari luar negeri untuk investasi, dipandang sebagai solusi yang dapat diandalkan untuk masalah modal dalam pendanaan kegiatan yang terbatas. Pergerakan keuangan yang cepat memberikan Indonesia peluang yang sangat baik untuk mendanai pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi.

Majid (2012: 2) berpendapat bahwa:

Arus masuk modal asing (*capital inflows*) juga berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan, selain itu masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (*saving investment gap*) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Adapun data Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Penanaman Modal Asing disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Penanaman Modal Asing Indonesia Tahun 1998-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Utang Luar Negeri (Juta \$)	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)	Penanaman Modal Asing (PMA) (Juta \$)
1998	-13,13	128.941	172.670	4.010,53
1999	0,79	136.173	231.878	10.800,13
2000	4,92	172.871	221.467	15.420,00
2001	3,64	132.347	341.563	15.055,90
2002	4,50	128.115	322.180	9.789,10
2003	4,78	133.780	376.505	13.207,20
2004	5,03	137.488	427.177	10.279,80
2005	5,69	134.504	509.632	8.916,90
2006	5,50	132.633	667.129	5.977,00
2007	6,35	141.180	757.650	10.341,40
2008	6,01	155.080	985.731	14.871,40
2009	4,63	172.871	937.382	10.815,30
2010	6,22	202.413	1.042.117	16.214,80
2011	6,49	225.375	1.294.999	19.474,50
2012	6,26	252.364	1.491.410	24.564,70
2013	5,73	266.109	1.650.564	28.617,50
2014	5,01	293.328	1.777.183	28.529,70
2015	4,88	310.730	1.806.515	29.275,94
2016	5,03	320.006	1.864.275	28.964,10
2017	5,07	352.469	2.007.352	32.239,80
2018	5,17	375.430	2.213.118	29.307,91
2019	5,02	403.563	2.309.287	28.208,76
2020	-2,07	416.935	2.595.481	28.666,30
2021	3,69	416.278	2.697.237	31.093,10

Sumber : Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

Pada Tabel 1.1 di atas terlihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 mengalami penurunan ke arah negatif akibat dari krisis moneter. (Maesaroh, 2022: 6) mengatakan “Indonesia mengalami resesi hebat pada tahun 1998. Ekonomi mengalami kontraksi hingga -13,13%, sementara inflasi Indonesia melambung sebesar 77,63% pada tahun 1998”. Secara periodik pertumbuhan ekonomi dari tahun 1999 sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun

1999 sampai tahun 2000 pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan bertumbuh dari 0,79% menjadi 4,92%. Memasuki tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 3,64%. Kemudian pada tahun 2002 sampai tahun 2011, diketahui bahwa selama periode 10 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 6,49% dikarenakan terjadi peningkatan kinerja yang dicerminkan pada peran investasi dan ekspor yang meningkat. Memasuki tahun 2012 sampai tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Namun, pertumbuhan ekonomi naik dengan rata-rata 5% pada tahun 2016 sampai tahun 2019.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1999 sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif pasca krisis moneter pada tahun 1998. Namun, memasuki tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar -2,07%.

Hayati (2022: 1) mengatakan bahwa:

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2021 Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Sebagai hasil dari upaya yang dilakukan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk membeli produk atau jasa, sehingga permintaan domestik pulih dan produksi meningkat sebagai akibat dari respon dunia usaha. Upaya

pengendalian Covid-19 berhasil membangkitkan pertumbuhan nasional sebesar 3,69%.

Pada Tabel 1.1 utang luar negeri pada tahun 1998 sampai tahun 2000 mengalami peningkatan yang diakibatkan pada pasca krisis moneter, peningkatan tersebut dilakukan agar dapat menutupi anggaran APBN. Pada tahun 2001 dan tahun 2002 utang luar negeri menurun dari 132.347 Juta US\$ menjadi 128.115 Juta US\$ yang disebabkan pemerintah mengurangi utang luar negeri melalui kebijakannya. Kemudian, tahun 2003 dan tahun 2004 utang luar negeri meningkat dari 133.780 Juta US\$ menjadi 137.488 Juta US\$ disebabkan pemerintah menambahkan jumlah utang untuk menutupi defisit anggaran. pada tahun 2005 sampai tahun 2006 utang luar negeri mengalami penurunan dari 134.504 Juta US\$ menjadi 132.633 Juta US\$. Kemudian pada tahun 2007 sampai tahun 2021 posisi utang luar negeri baik yang dipengaruhi pemerintah dan swasta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. (Dihni, 2022:10) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan “lonjakan utang yang terjadi saat ini tidak berlangsung begitu saja. Kondisi utang sudah diperparah sejak puluhan tahun, dan makin buruk saat krisis moneter berlangsung pada tahun 1997-1998”. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 utang luar negeri indonesia mengalami peningkatan diakibatkan Indonesia mengalami masa pandemi. Peningkatan utang luar negeri pada saat pandemi merupakan langkah yang di ambil pemerintah untuk menyelamatkan dan mensejahterakan masyarakat di tengah krisis pandemi Covid-19.

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang dimana pada tahun 1998 sampai tahun 2000 pengeluaran pemerintah mengalami

peningkatan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemulihan perekonomian masyarakat pasca krisis moneter. Pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari awal tahun 2001 sampai tahun 2010, yang dimana peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 258.081 Miliar Rupiah. Memasuki tahun 2011 sampai tahun 2021 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang disebabkan pemerintah ingin meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 peningkatan pengeluaran pemerintah dari 2.595.481 Miliar Rupiah menjadi 2.697.237 Miliar Rupiah, yang bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemi.

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat realisasi penanaman modal asing setiap tahunnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 1998 hingga tahun 2001 penanaman modal asing meningkat, peningkatan pada tahun 1998 sebagai akibat dari investasi yang dilakukan di Indonesia oleh negara Inggris, Jepang dan Jerman. Pada tahun 2002 dan tahun 2003 penanaman modal asing mengalami peningkatan dari 9.789,10 Juta US\$ menjadi 13.207,20 Juta US\$, namun pada tahun 2004 sampai tahun 2006 penanaman modal asing mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2007 dan tahun 2008 penanaman modal asing kembali meningkat dari 10.341,40 Juta US\$ menjadi 14.871,40 Juta US\$. Memasuki tahun 2009 sampai tahun 2017 penanaman modal asing cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan dari 29.307,91 Juta US\$ menjadi 28.208,76 Juta US\$. (Anggit, 2019: 6) Sri Mulyani menjelaskan pada tahun 2019 bahwa “ penurunan penanaman modal asing ini dialami seluruh

negara di dunia dan ia optimistis outflow ini sifatnya *short term*". Pada tahun 2020 dan tahun 2021 Indonesia menghadapi wabah virus Covid-19. (Pangastuti, 2021: 3) Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pada tahun 2021 bahwa "*capital outflow* disebabkan oleh dampak pandemi yang sifatnya berkelanjutan, namun aliran modal asing di Indonesia masih relatif stabil dan terjaga, didukung prospek kinerja ekonomi yang terus menunjukkan tren perbaikan".

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1998-2021**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis dalam meneliti.
2. Sebagai informasi lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang mungkin berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia antara tahun 1998-2021
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang berencana untuk melakukan penelitian serupa.
4. Menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di terima selama berada di bangku perkuliahan serta merupakan syarat dalam mendapatkan gelar sarjana strata satu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Defenisi Pertumbuhan Ekonomi

Mahzalena & Juliansyah (2019: 39) mengatakan “pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menanmbahkan output atau Pendapatan Nasional meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai semaksimal mungkin”.

Sukirno (2006: 9) mengatakan “pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya”.

Cara untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, yaitu:

$$g = \frac{GDPT - GDP}{GDP - \text{?}} \times 100\%$$

Keterangan:

g = Tingkat Persentase (%) pertumbuhan ekonomi.

GDPT = Gross Domestic Product atau Produk domestik Bruto yang di hitung pada harga tetap yang dicapai dalam satu tahun.

GDPT₋₁ = Gross Domestik Product atau Produk Domestik Bruto yang di hitung pada harga tetap yang dicapai pada tahun sebelumnya.

2.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Sihotang & Purba (2023: 43-44) mengatakan bahwa:

PDB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran penduduk suatu negara. Data produksi barang dan jasa yang akan dihitung dalam PDB tidak tersedia setiap saat, oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dihitung dalam periode tahunan, namun ada juga dihitung secara kuartalan. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi secara riil, sehingga yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah data PDB riil atau PDB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan e

2.1.3 Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2016: 429-431) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penting sebagai penentu mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam sesuatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan

penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi koefisien pertumbuhan ekonomi. Didalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Klasik

Sukirno (2016: 433) menjelaskan bahwa:

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas lahan dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dan investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Keadaan seperti ini tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali.

b. Teori Keynesian

Keynesian mengatakan bahwa kegiatan perekonomian sangat tergantung dari segi permintaan, yaitu kepada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Bagian dari pembelanjaan agregat, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Dan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + NX$$

Keynesian menekankan bahwa bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan melakukan intervensi dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan pengawasan langsung.

c. Teori Harrod-Domar

Sukirno (2016: 435-436) menjelaskan bahwa:

Teori Harrod-Domar menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya, (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor. Dalam teori ini tidak diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila perekonomian terdiri dari tiga sektor atau empat. Berdasarkan teori diatas dengan mudah dapat disimpulkan hal yang berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang sedemikian, barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G_1 + (X - M)_1$, dimana $I_1 + G_1 + (X - M)_1$ sama dengan $(I + \Delta I)$.

d. Teori Neo-Klasik

Sukirno (2016:437) menjelaskan bahwa:

Menurut teori neo-klasik yang dikemukakan Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam pandangan ini dinyatakan dalam persamaan: $\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$. Dalam persamaan tersebut dinyatakan bahwa ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal, ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk, dan ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi. Analisis Solow memberikan kesimpulan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran tenaga kerja.

2.2 Utang Luar Negeri

2.2.1 Defenisi Utang Luar Negeri

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara dari pihak luar. Penerimaan utang tersebut baik dalam bentuk devisa, barang atau jasa. Negara sebagai penerima utang atau pinjaman harus membayar utang luar negeri dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dengan persyaratan yang sudah di tentukan.

Ulfa & Zulham (2017: 147) mengatakan bahwa:

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa utang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara atau lembaga keuangan Internasional.

2.2.2 Jenis-jenis Utang Luar Negeri

Jenis utang luar negeri dapat dilihat menurut kelompok peminjam dan sumber dana, utang, yaitu:

1. Menurut Kelompok Peminjam

Bank Indonesia (2012: 10-11) menjelaskan bahwa utang luar negeri Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan tiga kelompok peminjam, yaitu:

- 1) Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.
- 2) Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.
- 3) Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang Lembaga Keuangan dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.

2. Menurut Sumber Dana Utang

Malik & Kurnia (2017: 33) sumber dana utang luar negeri yang diterima pemerintah Indonesia, terdiri dari:

- 1) Pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam dan beberapa lembaga keuangan regional dan internasional.
- 2) Pinjaman Bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari pemerintah negara-negara yang tergabung dalam negara anggota *Consultative Group On Indonesia (CGI)* sebagai lembaga yang menggantikan kedudukan IGGI.

2.2.3 Teori Utang Luar Negeri

Utang luar negeri dapat mempengaruhi perekonomian dikarenakan dapat memainkan peran penting dalam melengkapi kekurangan dana berupa tabungan domestik dan devisa. Setiap negara-negara berkembang menghadapi batasan dalam bentuk tabungan domestik yang tidak cukup memadai untuk pendanaan kemungkinan investasi yang ada. Serta kelangkaan devisa.

Todaro (1998: 169-170) menyatakan bahwa:

Sumber keuangan dari luar (baik berupa hibah atau pinjaman) dapat memainkan peranan yang penting dalam usaha melengkapi kekurangan sumber daya berupa devisa atau tabungan domestik. Pendekatan inilah yang disebut sebagai analisis bantuan luar negeri “dua kesenjangan”. Argumen model kesenjangan (*two-gap model*) ini mengatakan bahwa negara berkembang pada umumnya menghadapi kendala berupa keterbatasan tabungan domestik yang jauh dari mencukupi untuk menggarap segenap peluang investasi yang ada, serta kelangkaan devisa yang tidak memungkinkannya mengimpor barang-barang modal dan antara yang penting bagi usaha pembangunannya. Secara umum, model ini berasumsi bahwa kekurangan atau kesenjangan (antara persediaan dan kebutuhan) tabungan (*saving gap*) serta kesenjangan devisa (*foreign-exchange gap*) itu tidak sama bobotnya, dan satu sama lain berdiri sendiri (artinya keduanya tidak saling menggantikan). Kekurangan tabungan tidaklah dapat digantikan oleh cadangan devisa dan sebaliknya, kekurangan devisa tidak pula dapat dipenuhi oleh tabungan dalam negeri.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

2.3.1 Defenisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada suatu negara seperti modal, untuk mendanai kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sukirno (2016: 168) mengatakan “pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan”.

Putri, Heriberta, & Emilia (2018: 101) Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2.3.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Wahyuningsih (2020: 210) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan berdasarkan beberapa bentuk, yaitu:

1. Pengeluaran yang “*self-liquidating*” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan

penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*) dan sebagainya.

3. Pengeluaran yang tidak "*self-liquidating*" maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya di bidang rekreasi, pendirian monumen, objek-objek turisme dan sebagainya, yang dapat berakibat pada naiknya pendapatan nasional.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran berakibat pada pendapatan orang yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

2.3.3 Faktor Penentu Pengeluaran Pemerintah

Sukirno (2016: 168-169) menjelaskan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. **Proyeksi Jumlah Pajak yang Diterima**

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun

anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan Ekonomi yang Ingin Dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali perannya dalam perekonomian. Keinginannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengetahui tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

3. Pertimbangan Politik dan Keamanan

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan besar dalam

pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah memberlanjkan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

2.3.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Keynesian

Teori Keynesian adalah teori yang menjelaskan bagaimana peran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ini, campur tangan pemerintah dalam perekonomian mempengaruhi dapat atau tidaknya pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dumairy (2020: 161) mengatakan bahwa:

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu $Y=C+I+G+(X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat diamati bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya.

b. Teori Peacock dan Wiseman

Dumairy (2020: 163) menjelaskan bahwa:

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis "dialektika penerimaan pengeluaran pemerintah". Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

c. Teori Adolf Wagner

Wahyuningsih (2020: 205) menjelaskan bahwa:

Wagner menjelaskan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menjelaskan bahwa peranan pemerintah menjadi semakin besar karena pemerintah harus mengukur hubungan timbal balik dalam masyarakat. Wagner mendasarkan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lain.

2.4 Penanaman Modal Asing

2.4.1 Defenisi Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing didefenisikan sebagai investasi yang dilakukan dinegara tertentu oleh sektor swasta asing baik yang melalui penanaman modal asing langsung maupun penanaman modal asing tidak langsung. UU nomor 25 tahun 2007 dalam (Darwanti, Darman, & Yolanda 2021: 42) mengatakan “penanaman modal asing langsung adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah NKRI yang dilakukan oleh investor asing, baik sepenuhnya menggunakan modal asing maupun bersama-sama dengan investor dalam negeri”.

2.4.2 Jenis-jenis Penanaman Modal Asing

Jhingan (2016: 483) menjelaskan modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung. Sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing Langsung

Penanaman Modal Asing langsung merupakan perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Penanaman modal asing langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu:

- a) Pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal.
- b) pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanaman modal memiliki mayoritas saham.
- c) Pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal.
- d) Mendirikan suatu korporasi di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanaman modal.

2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung

Lebih dikenal sebagai investasi portofolio atau rentier yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja.

2.4.3 Faktor- faktor Penentu Penanaman Modal Asing

Menurut Sukirno (2016: 122) Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
2. Suku bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

2.4.4 Teori Penanaman Modal Asing

1. Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical on Foreign Investment*)

Chandrawulan (2014: 56, 58 dan 60) menjelaskan bahwa:

Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Pendapat yang sangat mendasar dari teori neo-klasik adalah bahwa penanaman modal asing khususnya negara berkembang, memainkan peran sebagai tutor. Penanaman modal asing menggantikan fungsi produksi yang lebih rendah di negara industri yang masuk melalui alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan-penemuan produk baru dan teknik produksi, serta pelatihan-pelatihan pekerja, khususnya perusahaan multinasional yang dianggap sebagai agen yang berguna bagi pengalihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Theodore H, Moran menyebut teori klasik dan teori neo klasik menggambarkan bahwa penanaman modal asing akan membantu negara penerima modal dalam memecahkan masalah keterbelakangan pembangunan, rendahnya tingkat produktivitas yang mengakibatkan rendahnya upah, rendahnya tabungan masyarakat dan rendahnya tingkat penanaman modal. Penanaman modal asing dapat memecahkan masalah ini dengan membantu memberikan keahlian manajemen yang efektif, pemasaran dan teknologi yang meningkatkan produktivitas.

2. Teori Kebergantungan (*The Dependency Theory*)

Chandrawulan (2014: 61 dan 63) menjelaskan bahwa:

Teori ini didasari oleh pemikiran Marxis dan Engels yang menyatakan bahwa *capitalist development is a process that take place in a similar fashion in one country after anothe*. Teori ini didasarkan pada banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Penanaman modal asing berdasarkan teori kebergantungan (*dependency theory*) hanya menguntungkan perusahaan multinasional dan membuat kebergantungan negara berkembang dalam membangun ekonominya bergantung kepada penanaman modal asing dan tidak bermanfaat bagi negara penerima modal. Pada kenyataannya, di dunia saat ini dengan dikurangnya bantuan dana resmi terhadap negara-negara berkembang, penanaman modal menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan proyek-proyek besar. Lebih jauh lagi, keberadaan teori kebergantungan dalam penanaman modal asing langsung tetap dipertahankan di era globalisasi ini.

2.5 Hubungan-hubungan Variabel Penelitian

2.5.1 Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Utang luar negeri digunakan dalam mengisi pembiayaan-pembiayaan kegiatan. Utang luar negeri memiliki peran dalam mengisi ketersediaan tabungan domestik dan devisa. Karena utang luar negeri dapat meningkatkan ketersediaan tabungan dan dapat mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan, sehingga dianggap dapat mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat disediakan oleh utang luar negeri.

Lincoln Arsyad dalam Junaedi, (2018:565) mengatakan bahwa:

Utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai defisit anggaran.

2.5.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen dari kebijakan pemerintah yang memiliki peran dalam menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target dari pemerintah. Pemerintah ingin mencapai tujuan tersebut karena pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara.

Jhingan (2016: 388) mengatakan bahwa:

Peranan belanja negara dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta dan dalam mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.

2.5.3 Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan antara penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki hubungan yang positif. Masuknya investasi asing ke Indonesia memberi sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah masuknya modal segar untuk membantu pembiayaan berbagai sektor yang kekurangan dana. Penanaman modal asing dapat membiayai kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa dan pendapatan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memenuhi kegiatan

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, modal asing baru akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin besar arus masuk modal asing, semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi.

Todaro (1998: 151) mengatakan bahwa:

Analisis aliran neoklasik menjelaskan penanaman modal asing merupakan sesuatu yang sangat positif, dikarenakan penanaman modal asing mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerimanya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menginformasikan pemikiran penulis dan berfungsi sebagai faktor penting dalam pengembangan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut, sebagai berikut:

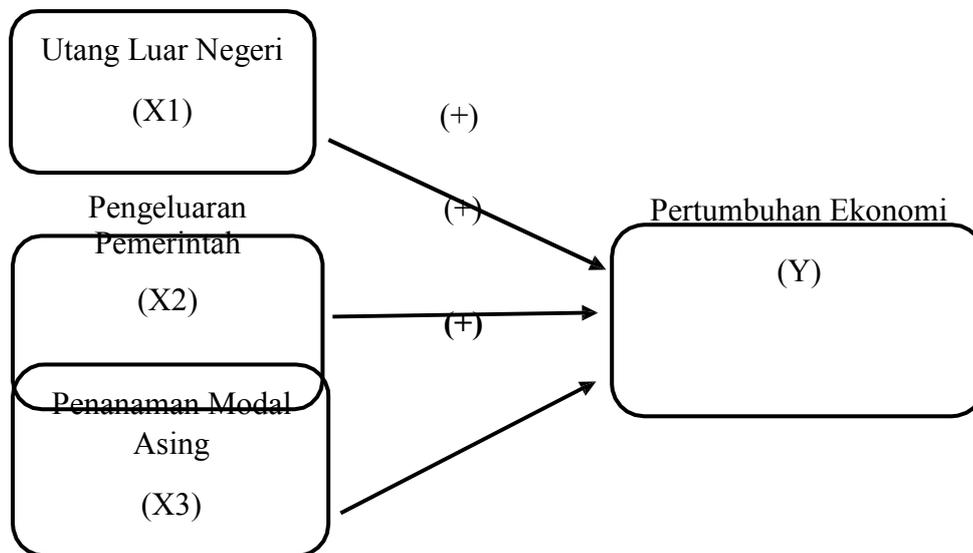
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	(Rudi, Rotinsulu, & Tenda, 2016: 332)	Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009.3-2014.4.	Metode Ordinary Least Square (OLS).	Utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	(Zahari, 2017: 195)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi	Metode Ordinary Least Square (OLS).	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

3	(Amiruddin, 2018: 197)	Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.	Metode Ordinary Least Square (OLS).	Penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4	(Putri, Heriberta, & Emilia, 2018: 103)	Pengaruh Inflasi, Investasi Asing Langsung, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.	Metode Ordinary Least Square (OLS).	Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, foreign direct investment (FDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh utang luar negeri, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya pendugaan dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.
2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.
3. Penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Indonesia, dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu utang luar negeri, pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing di Indonesia.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 1998-2021 yaitu dalam bentuk angka yang diambil dalam runtut waktu (*Time Series*) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Kemenkeu RI (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Data yang dikumpulkan adalah meliputi data utang luar negeri, pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai data-data serta menggabungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Penggunaan Model Ekonometrik

Metode analisis data yang digunakan dimulai dengan pembentukan model sistematis, yaitu suatu pernyataan yang berhubungan sistematis yang digunakan dalam menentukan hubungan yang berlaku di antara nilai utang luar negeri, pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel terikat (Y). Sedangkan pengolahan data yang di gunakan adalah dengan menggunakan program Eviews 9.0.

Tahapan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda ditempuh dengan langkah menentukan persamaan regresinya adalah:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{i1} + \hat{\beta}_2 X_{i2} + \hat{\beta}_3 X_{i3} + \epsilon_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Namun dikarenakan satuan data (variabel bebas dan variabel tak bebas) berbeda dan nilai data tidak berdistribusi dengan normal, maka model ditransformasikan ke bentuk semilog. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \ln X_{i1} + \hat{\beta}_2 \ln X_{i2} + \hat{\beta}_3 \ln X_{i3} + \epsilon_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Dimana:

Y = Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia (%)

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi

$\ln X_1$ = Utang luar negeri (%)

$\ln X_2$ = Pengeluaran pemerintah (%)

$\ln X_3$ = Penanaman modal asing (%)

ϵ_i = Galat (*Error term*)

3.5 Uji Kebaikan Suai (R^2)

Uji Kebaikan Suai (R^2) bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan suai, model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel-variabel tak bebas yang dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Artinya dari 1 adalah semakin nilainya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi dikarenakan mampu menjelaskan data aktual.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Secara Individu (Uji t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah, dan Penanaman Modal Asing) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi). Maka dilakukan pengujian uji-t pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ (0,05).

1. Utang Luar Negeri (X1)

$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$, artinya utang luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_1 > 0$, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$ = Koefisien regresi

β_1 = Parameter

$\sigma(\beta_1)$ = Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Utang Luar Negeri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Utang Luar Negeri secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

2. Pengeluaran Pemerintah (X2)

$H_0 : \hat{\beta}_2 = 0$, artinya pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_2 > 0$, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\sigma(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$ = Koefisien regresi

β_2 = Parameter

$\sigma(\hat{\beta}_2)$ = Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$,

maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pengeluaran Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

3. Penanaman Modal Asing (X3)

$H_0 : \hat{\beta}_3 = 0$, artinya penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_3 > 0$, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{\frac{s(\hat{\beta}_3)}{\sqrt{3}}}$$

$$\frac{s(\hat{\beta}_3)}{\sqrt{3}}$$

$\hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi

β_3 = Parameter

$s(\hat{\beta}_3)$ = Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Penanaman Modal Asing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Penanaman Modal Asing secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Dasar pengambilan keputusannya, yaitu :

1. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.6.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji-F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama atau tidak mempengaruhi variabel terikat. Adapun langkah-langkah pengujian uji-F sebagai berikut :

- a. Menurut hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
 1. $H_0 : \hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_2 = \hat{\beta}_3 = 0$ berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia.
 2. $H_1 : \hat{\beta}_i$ tidak semua nol, $i = 1,2,3$ berarti variabel bebas secara serentak atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Mencari nilai F_{hitung} adalah nilai kritis $F_{statistik}$ dari tabel. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator ($k-1$) dan df untuk denominator ($n-k$).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$\frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

K : Banyaknya Koefisien Regresi

n : Banyaknya Sampel

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Dasar pengambilan keputusannya, yaitu :

1. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel bebas (independen). Variabel bebas seharusnya tidak mempunyai hubungan antar variabel bebas lainnya dalam model regresi yang layak. Untuk mendeteksinya, dapat dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika nilai VIF < 10 maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas.

3.7.2 Autokorelasi

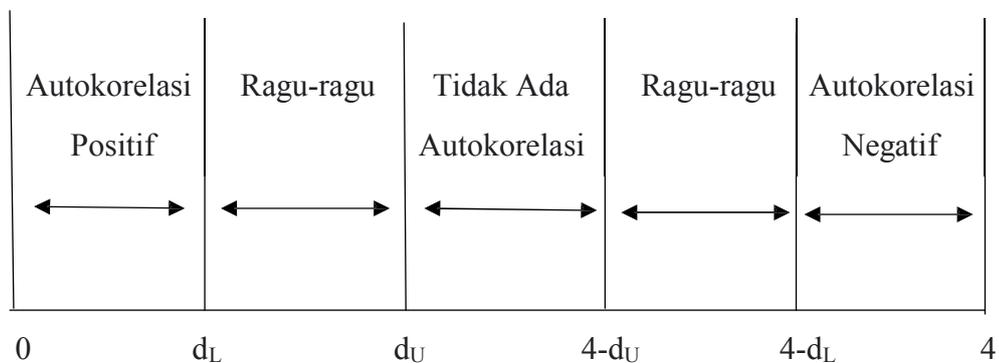
Ghozali (2013: 107) mengatakan ”autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu atau *disturbance error*) pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokolerasi”. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya problem autokorelasi dilakukan dengan beberapa cara untuk mengujinya, yaitu :

1. Durbin Watson

Ghozali (2013: 108) mengatakan “uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen”. Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_L dan D_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil ukuran, sebagai berikut:

- $0 < d < d_L$: Menolak hipotesis 0 (ada Autokorelasi Positif)
- $0 \leq d \leq d_U$: Daerah keragu-raguan (Tidak ada keputusan)
- $d_U < d < 4-d_L$: Gagal menolak hipotesis 0 (Tidak ada autokorelasi)
- $4-d_U \leq d \leq 4-d_L$: Daerah keragu-raguan (Tidak Ada Keputusan)
- $4-d_L < d < 4$: Menolak Hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Negatif)
- $4- d_L < d < 4$: Menolak hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Negatif)



Gambar 3. 1 Durbin Watson

2. Uji Run

Untuk Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga menggunakan Uji Run. Menurut Ghozali (2013:116) “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”.

Cara yang digunakan dalam Uji Run, yaitu :

H_0 = Galat (ress_1) acak.

H_1 = Galat (ress_1) tidak acak.

Jika nilai probabilitas (signifikan) $> 0,05$ yang artinya galat menyebar secara acak. Jika nilai probabilitas (signifikan) < 0.05 yang artinya galat tidak menyebar secara acak.

3.7.3 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi residual terdistribusi normal, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan disrtibusi yang mendekati distribusi normal. Dengan melihat nomal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal merupakan metode yang tepat. Dasar pengambilan keputusan, sebagai berikut :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8 Definisi Operasional Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan GDP Riil atau PDB Riil dari tahun ke tahun yang diukur dengan persen (%). Data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998-2021.

2. Utang Luar Negeri (X1)

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri merupakan total utang luar negeri Indonesia yang diperoleh dari para kreditor di luar negara. Utang luar negeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah ULN dari tahun 1998-2021 berdasarkan kelompok peminjam yang diukur dengan satuan Juta US\$/Tahun.

3. Pengeluaran Pemerintah (X2)

Pengeluaran pemerintah merupakan total pengeluaran negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja pemerintah pusat, belanja daerah, dan belanja lain-lain. Data yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah tahun 1998-2021 yang tercantum dalam dokumen APBN yang diukur dengan satuan Milyar Rupiah/Tahun.

4. Penanaman Modal Asing (X3)

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan total seluruh Realisasi Investasi di Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing baik

individu maupun perusahaan asing. Data yang digunakan adalah PMA tahun 1998-2021 diukur dengan satuan Juta US\$/Tahun.